

DINAMIKA PENCAPAIAN IDENTITAS SOSIAL POSITIF ATAS KEISTIMEWAAN YOGYAKARTA

Muhammad Johan N Huda

Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email : johannasrul@gmail.com

INTISARI

Artikel ini bertujuan untuk memahami secara mendalam dinamika kelompok pro penetapan dalam memaknai dan mencapai identitas sosial positif atas status keistimewaan Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi dengan jumlah subyek 6 orang yang merupakan anggota kelompok pro-penetapan.

Hasil penelitian menggambarkan bahwa kelompok pro penetapan mempersepsikan bahwa demokrasi bukan didefinisikan secara tunggal, tetapi disesuaikan dengan lokalitas budaya masyarakatnya. Pemaknaan terhadap keistimewaan Yogyakarta meliputi unsur penetapan pemimpin secara langsung, pengelolaan pertanahan, tata ruang, kelembagaan pemerintahan dan kebudayaan sesuai tradisi yang sudah berjalan ratusan tahun lalu. Kelompok pro penetapan menggunakan strategi kompetisi sosial dalam mencapai/mempertahankan identitas sosial positif atas status keistimewaan Yogyakarta.

Kata kunci : *identitas sosial, redefinisi atas demokrasi, kompetisi sosial*

ABSTRACT

This article tries to focus deeper on the dynamic of pro-stipulation group in identifying meaning which given on Yogyakarta's province as special status. As part of identity it follows with their strategy to achieve positive social identity. The research used both qualitative method and phenomenological framework. Subject consist of six (6) individuals, stand from member of pro-authority group.

The result is that meaning of Yogyakarta's special status relate with democracy, for the people of Yogyakarta it was not singular definition like in modern concept already given the meaning toward it. Furthermore, there are meanings of Yogyakarta' special status include stipulation leader, authority in landform, public space, administration of government and cultural identity that has been rooted for hundreds of years ago. Last part of this research is the finding of cultural competition as an effective strategy of to achieve positive social identity. It is so, since the action implicates the obvious gap between local and national identity throughout the strategy.

Key words : *social identity, redefinition of democracy, social competition*

LATAR BELAKANG

Status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta kini cenderung mengalami pendangkalan makna saat motif politik mendominasi perdebatan wacana. Politisasi dari pihak pro-pemilihan tampak mereduksi substansi

keistimewaan menjadi mekanisme pengisian jabatan kepala daerah semata.

Nampak jelas dalam sejarah perjalanan pemahaman keistimewaan, ada pihak yang menentang pengisian jabatan gubernur melalui penetapan. Mereka menganggap pemilihan

gubernur selama ini tidak demokratis karena tidak memberi peluang yang sama kepada rakyat untuk menjadi pemimpin. Muhammad Ulinuha, Koordinator Paguyuban Rakyat Yogyakarta Bersatu Untuk Demokrasi (Pagarbetis), misalnya menyatakan (Kompas, Rabu, 28 Maret 2012),

“Fakta sejarah kerap dipakai oleh kelompok pro penetapan sudah kadaluarsa. Ijab Kabul keistimewaan antara Presiden Soekarno dan Sultan HB IX dan Paku Alam VIII hanya berlaku untuk kedua tokoh ini, yang merelakan wilayah Yogyakarta sebagai bagian dari Indonesia”.

Menurutnya, semangat demokrasi modern mengharuskan semua jabatan publik bisa diperebutkan oleh seluruh rakyat. Pasca wafatnya Paku Alam VIII tahun 1998, jabatan gubernur yang diemban Sultan HB X diperoleh melalui proses pemilihan di DPRD. Meski pengesahan jabatan dilakukan dengan penetapan, Sultan melewati sebuah tahap kompetisi politik yang menjadi prasyarat demokrasi.

Dibalik menguatnya demokratisasi sebagai media penataan pemerintahan di Indonesia tidak bisa dipungkiri bahwa ada fakta mengenai status keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki dimensi historis sangat kuat, dan dilegitimasi pula dalam pasal 18 UUD 1945. Dimana secara historis sebelum bergabung dengan Negera Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Yogyakarta memiliki tatanan pemerintahan sendiri dengan nama Ngayogyakarta Hadiningrat yang berdiri sejak 13 Februari 1755. Disamping memiliki sistem pemerintahan yang telah berjalan ratusan tahun, sistem kesultanan Yogyakarta juga melahirkan sebuah entitas sosial yang mengkonstruksi nilai-nilai kultural tertentu, misalnya, tatanan tersebut mampu menghadirkan situasi stabil kondusif, keramahan warga, dan kekayaan budaya menjadi ciri wilayah hingga saat ini

Sebagai implikasi dari fakta sejarah yang mengakar itu muncul kelompok pro-penetapan

yang sangat kuat menolak adanya intervensi dari pemerintah pusat maupun kelompok pro-pemilihan. Menurut Widiasto Wasono Putro selaku Koordinator Sekretaris Bersama Keistimewaan Yogyakarta munculnya aspirasi yang berbeda soal keistimewaan Yogyakarta merupakan hal yang wajar. Namun sudah sangat jelas proses perjuangan keistimewaan Yogyakarta telah berjalan bertahun-tahun menunjukkan masyarakat Yogyakarta tetap menginginkan Sultan dan Paku Alam sebagai pemimpin. Dukungan wakil rakyat juga kembali ditegaskan dalam peringatan 66 tahun Amanat 5 September tahun lalu (2011). Saat itu ketua DPRD DIY Yoeke Indra Agung Lak-sana menyampaikan isi amanat rakyat DIY, yang berisi Sultan dan Paku Alam agar tetap memimpin Yogyakarta sebagai gubernur dan wakil gubernur (Kompas, Kamis 18 Maret 2012).

Persoalan yang sedang membelit sistem kesultanan Yogyakarta ini tidak bisa dilokalisir hanya menjadi persoalan yang terkait dengan isu pengisian jabatan gubernur dan wakil gubernur saja. Sebaliknya, telah meluas menjadi persoalan yang terkait dengan peneguhan sebuah identitas sosial yang bernama keistimewaan. Sehingga tidak dipungkiri manifestasi dari krisis identitas sosial ini semakin lama semakin meluas dan kompleks. Hal ini nampak sekali dari ekspresi masyarakat Yogyakarta yang merasa terancam dan menguat identitas sosialnya dengan menuliskan kata-kata perlawanan seperti *“Pejah gesang nderek Sultan”*, *“Ijab Kabul HB IX”*, *“Keistimewaan Harga Mati”* yang terpampang di sudut-sudut kota Yogyakarta sebagai bentuk protes, frustrasi dan ekspresi kekecewaan terhadap pemerintah pusat dan kelompok pro-pemilihan.

Penggunaan teori identitas sosial menurut Reicher (Hogg, Michael. Abrams, Dominic. Otten, Sabine. Hinkle, Steve. 2004) dapat juga digunakan untuk mempelajari partisipasi dalam protes sosial atau kelompok aksi sosial. Studi tentang protes sosial menunjukkan bagaimana kekecewaan atau ketidaknyamanan

individu ditransformasikan dalam aksi sosial. Begitu pula, protes tersebut menjadi mekanisme dan motivasi simpatisan sehingga mudah dimobilisasi sebagai aktivis atau partisipan (Klandermans. 1997). Klandermans berpendapat bahwa mobilisasi mencerminkan hubungan sikap-perilaku dari partisipan yang simpati terhadap isu yang berkembang akan mempengaruhi sikap mereka. Lebih lanjut diungkapkan bahwa partisipasi akan menimbulkan dilema sosial, dimana protes secara umum baik untuk kebaikan sosial (mencapai persamaan) atau untuk melawan penyakit sosial (penindasan). Dengan kata lain, dapat dijelaskan adanya identifikasi sosial cenderung meningkatkan kemungkinan terhadap aksi sosial dan protes secara kelompok.

Unsur kelompok memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam menjelaskan konsep identitas sosial, dimana kelompok menjadi tempat untuk mengkonstruksi kognitif, perasaan dan perilaku anggotanya. Selain itu kelompok dianggap sebagai kumpulan dari distribusi orang yang sama identitas sosialnya, dan melakukan persaingan dengan orang lain dalam mencapai keunikan yang positif (Hogg, et al, 2004). Identitas sosial juga dijelaskan sebagai rasa keterikatan, peduli, bangga dapat berasal dari pengetahuan seseorang dalam berbagai kategori keanggotaan sosial dengan anggota yang lain, bahkan tanpa perlu memiliki hubungan personal yang dekat, mengetahui atau memiliki berbagai minat (Hogg dan Abrams, 1990). Dengan kata lain identitas sosial menjadi bagian dari konsep diri individu yang berasal dari pengetahuannya selama berada dalam kelompok sosial tertentu dengan disertai internalisasi pentingnya nilai-nilai, emosi, partisipasi, peduli dan bangga sebagai anggota kelompok terhadap kelompoknya.

Penting pula kiranya mencermati pola masyarakat Yogyakarta mengekspresikan protes mereka, mengapa selalu memakai cara-cara yang elegan, tidak frontal, dan didukung oleh pembentukan pengetahuan. Misal, kirab

masal pro-penetapan, pagelaran budaya pro-penetapan, sarasehan dan peringatan 100 tahun HB IX. Mungkinkah hal itu memiliki hubungan dengan penanaman budaya yang dilakukan Sultan? atau justru semata-mata penanda/proses meneguhkan identitas sosial positif mereka saja?

Berdasarkan fenomena dan analisa permasalahan di atas sangat menarik untuk mengkaji dinamika psikologi dari kelompok pro-penetapan dalam mencapai identitas sosial positif untuk mempertahankan status keistimewaan Yogyakarta. Dengan kata lain melalui pengkajian identitas sosial pada kelompok pro-penetapan akan ditemukan intisari pikiran, perasaan dan perilaku anggota masyarakat dalam konteks budaya lokal yang sedang berhadapan dengan kepentingan penguasa dan tuntutan alam berfikir demokratis.

Melalui kajian dengan menggunakan teori identitas sosial terhadap fenomena perjuangan keistimewaan Yogyakarta akan diketahui bentuk (re)aksi dari tekanan sosial dan politik yang dialami oleh masyarakat yang pro-penetapan dalam mempertahankan eksistensinya di dalam konteks hubungan berbangsa dan bernegara. Tekanan sosial maupun politik yang dirasakan secara tidak sadar akan menimbulkan krisis identitas dan dapat membangkitkan kebutuhan terhadap harga diri (*self esteem*) tinggi serta menyadarkan kepada masyarakat Yogyakarta untuk mencapai identitas sosial yang positif.

RUMUSAN MASALAH

Pertanyaan dasar penelitian ini adalah a) bagaimanakah kelompok pro-penetapan memaknai keistimewaan Yogyakarta sebagai bagian dari identitas sosialnya, dan b) bagaimana pula dinamika psikologi kelompok pro-penetapan dalam rangka mencapai identitas sosial positif meski berhadapan dengan tantangan secara politik dan arus demokrasi?.

TUJUAN PENELITIAN

Penelitian yang akan dilakukan menggunakan teori identitas sosial untuk mengkaji tentang upaya untuk mencapai identitas sosial yang positif. Hal ini akan sangat berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya karena menempatkan adanya politisasi terhadap identitas sosial yang sudah mapan yaitu keistimewaan Yogyakarta

LANDASAN TEORI

Penelitian ini menggunakan teori identitas sosial dalam menjelaskan dinamika pencapaian identitas sosial positif atas keistimewaan Yogyakarta. Identitas sosial pertama kali didefinisikan oleh Tajfel (Haslam, 2001) sebagai bagian dari pengetahuan individu tentang keanggotaannya dalam kelompok atau kelompok sosial yang disertai pentingnya nilai dan emosi sebagai anggota kelompok. Unsur kelompok berdasarkan definisi tersebut memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam menjelaskan konsep identitas sosial, dimana kelompok menjadi tempat untuk mengkonstruksi kognitif, perasaan dan perilaku anggotanya. Selain itu kelompok dianggap sebagai kumpulan dari distribusi orang yang sama identitas sosialnya, dan melakukan persaingan dengan orang lain dalam mencapai keunikan yang positif

Penelitian teori identitas sosial berasumsi bahwa orang berjuang dengan keras untuk memelihara nilai positif dari identitas sosialnya. Penyebabnya diantaranya nilai dari kategori sosial dibangun melalui perbandingan dengan kategori sosial lain yang relevan, dimana anggota kelompok akan bersikap berbeda, dengan menilai lebih positif terhadap kelompok di dalam dibandingkan kelompok di luar, yang pada akhirnya nilai positif tersebut menjadi karakter kelompok sebagai rangkaian menjadi kelompok mayoritas (Hogg, dkk, 2004). Evaluasi positif seseorang terhadap salah satu kelompok dapat membangun identitas personal orang itu sendiri dan sebagai upaya menghormati identitas orang lain.

Pada level hubungan antar kelompok, ide ini menerangkan mengapa kelompok berkompetisi dengan kelompok lain untuk menjadi berbeda dan lebih baik, serta mengapa mereka berjuang mencapai status yang tinggi, prestise dan keberbedaan. Berkaitan dengan hal tersebut kelompok terlebih dahulu harus dipahami sebagai kumpulan yang terdiri dari pembagian orang yang sama identitas sosialnya, kompetisi dengan orang lain dalam penilaian positif terhadap sesuatu yang khusus. Kompetisi adalah strategi yang tergantung pada keyakinan orang tentang hubungan antar kelompok yang alami. Secara umum ide tersebut menjadi teori identitas sosial dan perilaku antar kelompok (Hogg, dkk, 2004).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini akan dipahami melalui pendekatan fenomenologi. Fenomenologi adalah pendekatan yang menggambarkan arti dari pengalaman hidup (*lived experience*) dari beberapa individu mengenai suatu konsep atau *phenomenon* (Creswell, 1998). Menurut Moustakas (1994) terdapat beberapa proses inti dalam penelitian fenomenologi yaitu, *epoche, reduction, imaginative variation dan synthesis of meanings and essence*. Penggunaan pendekatan fenomenologi selain bertujuan untuk menangkap makna terdalam dari status keistimewaan Yogyakarta juga untuk mencari asas-asas budaya, sejarah dan politik yang mewarnai pembentukan makna itu sendiri.

Subjek penelitian adalah sumber utama data penelitian yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti (Azwar, 2003). Adapun subyek penelitian ini terdiri dari para tokoh pro-penetapan seperti Ketua Sekretariat Bersama Keistimewaan Yogyakarta, anggota Sekretaris Bersama Keistimewaan, dan Anggota budaya Yogyakarta. *Kedua*, adalah informan yang terdiri dari masyarakat umum yang secara geneologis berasal dari daerah istimewa Yogyakarta.

Untuk memperoleh data yang representatif baik data primer maupun data sekunder dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 1999) menggunakan metode observasi partisipan, dokumentasi dan wawancara mendalam. Ketiga metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh fakta-fakta psikologis dari individu maupun kelompok yang tengah berhadapan dengan tekanan politik dan arus demokrasi dalam mencapai identitas sosial positif keistimewaan Yogyakarta. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kancah lapangan difokuskan pada lokasi di sekitar pusat keraton kasultanan Yogyakarta. Lokasi tersebut dipilih dikarenakan memiliki hubungan yang erat dengan kontrol kekuasaan dari kesultanan Yogyakarta.

HASIL PENELITIAN

a. Pemaknaan Keistimewaan Yogyakarta

Hasil penelitian menunjukkan pemaknaan terhadap keistimewaan Yogyakarta sangat positif sebagaimana wawancara berikut:

Sebagai suatu atribut dari lokalitas budaya berperan penting mengarahkan individu sebagai bagian dari kelompok untuk mengevaluasi secara positif (W1, 22-23).

Sekretariat Bersama (Sekber) Keistimewaan mengidentifikasikan kelompoknya sebagai kelompok pro penetapan yang bersatu memperjuangkan terealisasinya keistimewaan Yogyakarta.

Sekber keistimewaan menjadi wadah bersama yang di dalamnya terdiri dari individu lintas agama yang bersatu memperjuangkan terealisasinya keistimewaan Yogyakarta (W III, 35-36).

Makna keistimewaan Yogyakarta meliputi: *Pertama* penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur tanpa melalui mekanisme demokrasi sebagaimana wawancara berikut ini:

Mekanisme penetapan Gubernur dan Wakil Gubernur tanpa melalui mekanisme demokrasi dipilih masyarakat Yogyakarta sebagai cara berdemokrasi yang khas di dalam menentukan pemimpin (W IV, 56-58)

Kekuasaan dalam masyarakat Yogyakarta bukanlah sesuatu yang pantas untuk diperdebatkan seperti saat ini. Bagaimana hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin lebih bersifat magis sebagaimana wawancara berikut ini:

Kekuasaan dalam masyarakat Yogyakarta diletakkan dalam yang syarat dengan magis. Adalah konsep "Manunggaling Kawulu Gusti" mewakili dimensi kemagisan dalam relasi kekuasaan antara yang dipimpin dan yang memimpin (W II, 10-13)

Kedua, keistimewaan Yogyakarta dimaknai sebagai otonomi dalam pengelolaan pertanahan sebagai perwujudan sifat raja yang mengayomi dan melindungi untuk kesejahteraan rakyatnya, sebagaimana wawancara berikut:

Siapa pun rakyat dapat memperoleh penguasaan tanah untuk kesejahteraan. Keraton memberikan penguasaan tanah untuk fasilitas umum, seperti stasiun, tugu, lempuyangan. Tanah juga diberikan untuk para abdi dalem (keluarga kerajaan), perkebunan rakyat, dan peruntukan tanah untuk rakyat jelata (W IV, 89-100)

Masyarakat Yogyakarta mempersepsikan bahwa pengelolaan tanah berdasarkan hukum keraton Yogyakarta jauh melebihi peraturan pertanahan yang ada di Indonesia sekarang, yang dipengaruhi oleh Belanda juga banyak mengadopsi peraturan pertanahan dari keraton Yogyakarta sebagaimana wawancara berikut ini:

Pengaturan tanah di DIY sudah lama diatur Kerajaan Mataram Yogyakarta. Kon-

sep pengaturan itu berakar pada folosofi dan kultur yang melekat pada raja. Artinya raja bukan sama sekali tuan tanah. Namun atas nama Tuhan raja mengatur peruntukan tanah semata-mata untuk kesejahteraan bersama (W III, 44-46)

Makna dari keistimewaan selanjutnya adalah terkait dengan kelembagaan DIY yang secara tegas membedakan dengan propinsi lainnya. Karena keistimewaan sebagai atribut identitas sosial masyarakat Yogyakarta sebagaimana wawancara berikut ini:

kelembagaan DIY menghilangkan kata propinsi di setiap nomenklatur Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD). Hal ini menindaklajuti disahkannya UUK nomer 13 tahun 2012 tentang keistimewaan DIY. Contoh penyebutan Biro Hukum Sekretariat Daerah Propinsi DIY sekarang menjadi Biro Hukum Sekretariat Daerah DIY (W I, 47-50)

Tata ruang yang juga menjadi point penting memaknai keistimewaan Yogyakarta adalah dengan melakukan penataan area publik yang bebas dengan polusi visual sebagaimana wawancara berikut:

Area hijau harus diselamatkan dengan semacam peraturan yang melarang memaku, dan menalikan iklan pada pepohonan dan tiang listrik. Semakin sedikit iklan-iklan visual akan semakin baik tingkat tata ruang kotanya (W II, 89-91)

Terakhir tidak kalah pentingnya dari pemaknaan terhadap keistimewaan adalah sektor kebudayaan. Kebudayaan selama ini menjadi magnet bagi wisatawan untuk datang ke Yogyakarta untuk sekedar bernostalgia atau berbelanja di kota batik ini. namun yang lebih utama dari budaya material yang selama ini sudah eksis, perlu juga membangun budaya immaterial yang berdasarkan nilai.

Nilai-nilai tersebut nantinya menjadi bagian integral dari jati diri masyarakat

Yogyakarta. Salah satunya adalah nilai-nilai toleransi yang harus dipupuk terus-menerus dalam hubungannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara (W III, 55-57).

Yogyakarta harus menjadi pelopor lahirnya *civil tolerance* yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman dan membangun kerjasama dengan siapapun. Memberikan kenyamanan bagi siapapun yang singgah di bumi Mataram ini. di bawah ini digambarkan diagram pemaknaan atas keistimewaan Yogyakarta, sebagaimana wawancara berikut ini:

menjadi pelopor lahirnya civil tolerance yang menjunjung tinggi nilai-nilai keberagaman. Memberikan kenyamanan bagi siapapun yang singgah di bumi Mataram ini (W IV, 66-67)

b. Perbandingan Sosial Pro Penetapan atas Status Keistimewaan Yogyakarta

Tuntutan atas keistimewaan Yogyakarta dari kelompok pro penetapan yang diwakili oleh Sekber Keistimewaan Yogyakarta dan masyarakat lainnya mengundang pertanyaan mendasar mengenai apa yang menjadi motivasi dan bagaimana cara untuk mencapai keinginan baik secara individu maupun kolektif.

Pada level individu upaya mempertahankan status keistimewaan Yogyakarta dimotivasi oleh kategorisasi diri terhadap atribut-atribut lokalitas yang dimiliki Yogyakarta seperti budaya, tradisi, agama, keturunan, maupun yang bersifat etnisiti. Individu masuk ke dalam batas-batas kelompok yang sulit untuk ditembus, dikarena di dalam kelompok individu merasa memperoleh kesesuaian antara identitas personal dengan identitas sosial. Keistimewaan ibarat rumah bersama yang di dalamnya sudah lama hidup beragama identitas personal secara harmonis.

Warga Yogyakarta merasakan tinggal dalam kondisi yang nyaman dalam keberagaman. Sehingga secara individual

warga Yogyakarta memiliki tingkat identifikasi yang tinggi terhadap status keistimewaan dikarenakan muncul kepuasan yang seimbang antara identitas personal dan identitas sosial kelompok (W III, 70-73).

Sebagaimana menurut teori ini optimalisasi keunikan seseorang akan melakukan identifikasi secara kuat terhadap kelompok yang memberi kepuasan secara seimbang antara identitas personal dan identitas kelompok. Ekspresi dari optimalisasi keunikan warga Yogyakarta dapat ditunjukkan dengan melihat perilaku keseharian warga Yogyakarta yang menonjolkan keyakinan terhadap nilai-nilai luhur yang hidup dalam tradisi. Dapat dilihat bagaimana nilai-nilai luhur itu menjadi pengontrol perilaku individu saat berjumpa dengan ancaman dari luar.

Misal masalah status keistimewaan Yogyakarta yang sempat membuat warga Yogyakarta resah, tidak mampu mencegah munculnya chaos dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Justru hal itu dijadikan sebagai perekat sosial yang menyatukan seluruh warga Yogyakarta (W II, 80-83)

Pada level kelompok upaya mempertahankan identitas sosial atas keistimewaan Yogyakarta diawali dengan mempersepsikan status keistimewaan Yogyakarta sebagai sesuatu yang tinggi atau rendah sebagai bagian dari harga diri kelompok. Penelusuran terhadap tokoh-tokoh Sekber Keistimewaan Yogyakarta ditemukan bahwa penilaian identitas sosial adalah tinggi. Hal ini disebabkan oleh komparasi dengan kategori sosial yang diwakili oleh pemerintah pusat. Perbandingan sosial (*social comparison*) antara kelompok adalah dasar untuk mengevaluasi identitas sosial mereka. Untuk mendapatkan identitas sosial positif, perbandingan akan difokuskan pada pembentukan aspek positif kepada *in-group (establishment of positif distinctiveness)* sebagaimana wawancara berikut :

Yogyakarta memiliki kebudayaan, keamanan, toleransi, anti korupsi dan sejarah kawasan sedangkan pemerintah pusat (Indonesia) yang kerap diidentikkan dengan tingginya korupsi, kekerasan dan hal-hal yang negatif lainnya (W IV, 100-101).

Status keistimewaan Yogyakarta oleh kelompok pro penetapan dipersepsikan memiliki dimensi yang lebih unggul dibandingkan dengan dimensi dari pemerintah pusat sebagaimana wawancara berikut :

Tetap mempertahankan mekanisme pemerintahan yang sudah ada sejak berdirinya kerajaan Mataram di atas alam pikir demokrasi saat ini (W II. 56-57).

Basis motivasi dari kelompok pro penetapan adalah identifikasi dari unggulnya identitas lokal dibandingkan identitas nasional dalam kerangka hubungan antar identitas sosial. Meskipun secara teritorial, wewenang dari identitas nasional lebih unggul, namun itu tidak berarti persepsi masyarakat pro penetapan terhadap identitas lokalnya menjadi rendah. Hal ini disebabkan oleh *stereotype* dari identitas nasional gagal dalam memberikan pengayoman dan mewujudkan kesejahteraan sosial.

c. Strategi Pencapaian Identitas Sosial Positif Atas Keistimewaan Yogyakarta

Tekanan pemerintah pusat dan sistem demokrasi yang menjadi tonggak menyelenggarakan pemerintahan di setiap jengkal teritorial menjadi faktor yang mendorong menguatnya krisis identitas sosial masyarakat Yogyakarta. Yogyakarta sebagai wilayah yang sudah memiliki bentuk pemerintahan kerajaan sudah ada sebelum NKRI dikumandangkan. Kenyataan sejarah inilah yang dinilai oleh kelompok pro penetapan adalah batas kelompok yang tidak dapat ditembus dengan kontrak politik dan demokrasi sebagaimana wawancara berikut :

Yogyakarta sebagai wilayah yang sudah memiliki bentuk pemerintahan kerajaan sudah ada sebelum NKRI dikumandangkan (W III, 88-89).

Kelompok pro penetapan merasakan adanya pengabaian atas keistimewaan Yogyakarta dengan dalih menegakkan keadilan dan demokrasi. Kondisi ini membawa ketegangan hubungan vertikal antara pusat dan daerah, antara identitas lokal melawan identitas nasional guna mempertahankan identitas sosial positif atas keistimewaan Yogyakarta.

Melihat berbagai ketimpangan di sektor nasional tersebut telah membuka ruang kompetisi sosial antara kelompok pro penetapan yang mewakili identitas lokal dengan pemerintah pusat yang menginginkan alam demokrasi hidup di bumi Mataram. Strategi kompetisi sosial dipilih oleh kelompok pro penetapan untuk mempertahankan status keistimewaan Yogyakarta sebagaimana wawancara berikut *Kata-kata perlawanan seperti "Pejah gesang nderek Sultan", "Ijab Kabul HB IX", "Keistimewaan Harga Mati" yang terpampang di sudut-sudut kota Yogyakarta sebagai bentuk protes, terhadap pemerintah pusat dan kelompok pro-pemilihan (W IV, 111-113).*

Kelompok pro penetapan sampai pada akhirnya mampu menggerakkan istana kesultanan Yogyakarta untuk mengambil sikap dengan tegas guna meredakan ketidakpastian yang dirasakan oleh masyarakat Yogyakarta melalui sabda tama Sultan Hamengku Buwono X tanggal 10 Mei 2012. Sabda Tama Raja Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Sri Sultan Hamengku Buwono X disampaikan dalam bahasa Jawa. Berikut isi Sabda Tama Sultan, Ingsun Kang Jumeneng Nata Mataram medarake Sabda :

'Dene Kraton Ngayogyakarta saha Kadipaten Paku Alaman iku, loro-loroning atunggal. Mataram iku Negri kang

merdika lan nduweni paugeran lan tata kaprajan dewe. Kaya kang dikersaake lan dikaperangake, Mataram ngesuhi Nuswantara, nyengkuyung jejeging negara, nanging tetep ngagem paugeran lan tata kaprajane dewe.

Kang mangkana iku kaya kang dikersaake, Sultan Hamengku Buwono sarta Adipati Paku Alam kang jumeneng, katetepake jejereng Gubernur lan Wakil Gubernur" (VI, 120-125)

Sabda Tama ini kali pertama sejak Sri Sultan Hamengku Buwono X naik tahta di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Menurut KRT Jatiningrat atau Romo Tirun, Sabda Tama itu dikeluarkan bila ada persoalan genting yang menyangkut Keraton Yogyakarta maupun Kadipaten Puro Pakualaman. Bagi kelompok pro penetapan Sabda Tama Sultan Hamengku Buwono X memiliki arti yang sangat penting yaitu sebagai momentum untuk melakukan ideologisasi atas keistimewaan Yogyakarta. Istilah keistimewaan adalah harga mati yang harus diperjuangkan untuk menjaga segala warisan sejarah dan kebudayaan masa lalu yang sudah mendarah daging dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta.

Kepuasan dan meningkatnya status identitas sosial warga Yogyakarta atas keistimewaan yang berhasil diraih pada tahun 2012 dianggap sebagai hal yang wajar, karena perjuangan untuk mencapai identitas sosial positif itu telah dilakukan sejak tahun 1998 hingga 2012. Saat ini yang perlu untuk dilakukan adalah bagaimana mengimplementasikan UUK nomer 13 tahun 2012 untuk mewujudkan kesejahteraan DIY. Kelompok pro penetapan yang diwakili oleh Sekber keistimewaan akan terus mengawal implementasi UUK tersebut sehingga identitas sosial positif atas keistimewaan tetap terjaga dan bisa memberi manfaat yang besar bagi warga Yogyakarta maupun Indonesia.

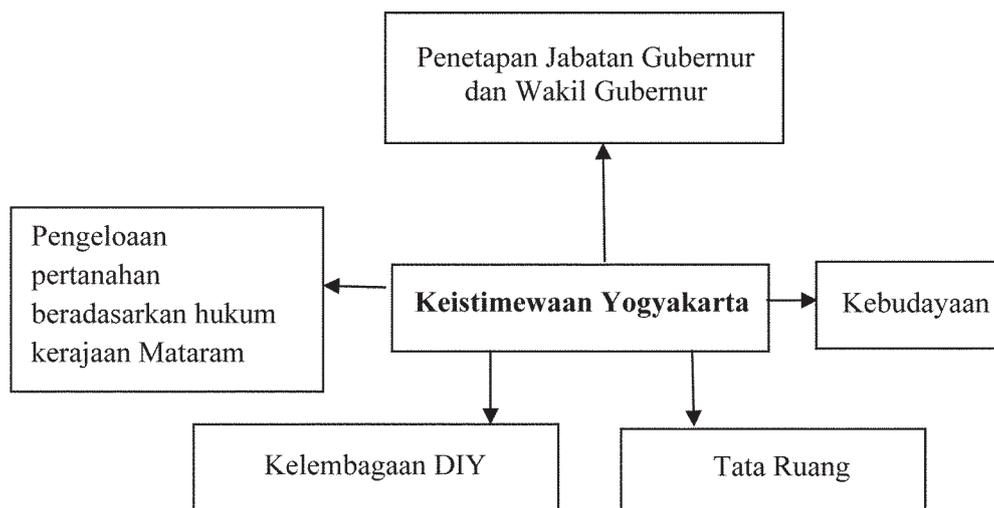
PEMBAHASAN

Makna keistimewaan Yogyakarta menurut ketua Sekber keistimewaan meliputi lima hal sebagai mana termaktub dalam Undang-undang Keistimewaan (UUK) yaitu: (1) Tata cara pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui penetapan bukan pemilihan, (2) Kelembagaan pemerintah daerah DIY yang diselenggarakan secara efektif dan efisien demi melakukan pelayanan yang maksimal berdasarkan prinsip responsibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi, (3) Kebudayaan yang diselenggarakan untuk memelihara dan mengembangkan hasil cipta, rasa, karsa, dan karya yang berupa nilai-nilai, pengetahuan, norma, adat istiadat, benda, seni, dan tradisi luhur yang mengakar dalam masyarakat DIY, (4) Pertanahan, Kesultanan dan Kadipaten berwenang mengelola dan memanfaatkan tanah Kesultanan dan tanah Kadipaten ditujukan untuk sebesar-besarnya pengembangan kebudayaan, kepentingan sosial dan kesejahteraan masyarakat, (5) Tata ruang, pengelolaan tata ruang harus memperhatikan tata ruang nasional dan tata ruang DIY.

Kelima atribut pemaknaan atas keistimewaan Yogyakarta secara bersama-sama membangun sebuah identitas sosial dari masyarakat di dalamnya. Bahkan juga menjadi faktor yang mendorong menguatnya identitas sosial jika sewaktu-waktu terjadi ketidakyamanan dan ketidakpastian dalam hubungannya dengan identitas sosial lain. Dengan ditetapkannya UUK Nmoer 13 tahun 2012 (kompas, 2012) yang memasukkan kelima atribut pemaknaan atas keistimewaan Yogyakarta, seolah menjadi sangat signifikan bahwa masyarakat Yogyakarta menjadikan Sultan dan Paku Alam, Kebudayaan, Pertanahan, Kelembagaan, dan Tata Ruang DIY sebagai atribut sosial yang tidak berubah-ubah dan harus ada yang tidak dipengaruhi oleh kondisi dan situasi apapun. Menurut Kelly & White (2006) masyarakat Yogyakarta telah mempunyai apa yang disebut sebagai identitas sosial terbayang (*imagery social identity*) yaitu salah satu atribut sosial yang bersifat melekat dengan diri kita yang tidak terpengaruh oleh perubahan situasi

Di bawah ini digambarkan diagram pemaknaan atas keistimewaan Yogyakarta.

Gambaran Pemaknaan Atas Keistimewaan Yogyakarta



Ekspresi dari optimalisasi keunikan warga Yogyakarta dapat ditunjukkan dengan melihat perilaku keseharian warga Yogyakarta yang menonjolkan keyakinan terhadap nilai-nilai

luhur yang hidup dalam tradisi. Dapat dilihat bagaimana nilai-nilai luhur itu menjadi pengontrol perilaku individu saat berjumpa dengan ancaman dari luar. Misal masalah

status keistimewaan Yogyakarta yang sempat membuat warga Yogyakarta resah, tidak mampu memancing munculnya *chaos* dalam kehidupan masyarakat Yogyakarta. Justru hal itu dijadikan sebagai perekat sosial yang menyatukan seluruh warga Yogyakarta dalam satu barisan memperjuangkan identitas sosialnya.

Penggunaan teori identitas sosial menurut Reicher (Hogg, dkk, 2004) dapat juga digunakan untuk mempelajari partisipasi dalam protes sosial atau kelompok aksi sosial. Dapat dikatakan bahwa pola pencapaian identitas sosial pada level individu dengan melakukan partisipasi dalam protes sosial maupun kelompok aksi sosial dalam hal ini Sekber Keistimewaan Yogyakarta adalah salah satu bentuk tempat berjuang individu yang memiliki identitas sosial yang sama.

Perbandingan sosial (*social comparison*) antara kelompok adalah dasar untuk mengevaluasi identitas sosial mereka. Untuk mendapatkan identitas sosial positif, perbandingan akan difokuskan pada pembentukan aspek positif kepada *in-group* (*establishment of positif distinctiveness*). Perbandingan diarahkan pada atribusi lokal yang dimiliki Yogyakarta seperti kebudayaan, keamanan, toleransi, anti korupsi dan sejarah kawasan dengan pemerintah pusat yang kerap diidentikkan dengan hal-hal yang negatif (Brown, 2004).

Status perbandingan sosial antara identitas lokal yang diwakili oleh Yogyakarta dan identitas nasional sangat dinamis. Secara keseluruhan Yogyakarta dievaluasi secara positif daripada identitas keindonesiaan. Sebagaimana tergambar dalam tabel di bawah ini

Perbandingan sosial	Status pemerintahan	Status budaya	Status penyelenggaraan negara
Identitas lokal (Yogyakarta)	Sudah ada sebelum Indonesia merdeka	Toleransi tinggi	Korupsi relatif rendah
Identitas nasional (Pemerintah pusat)	Baru merdeka 1945	Intoleransi tinggi	Korupsi relatif tinggi

Pada level kelompok upaya mempertahankan identitas sosial atas keistimewaan Yogyakarta diawali dengan mempersepsikan status keistimewaan Yogyakarta sebagai sesuatu yang tinggi atau rendah sebagai bagian dari harga diri kelompok. McDonald (Cicilia, 2003) berpendapat bahwa kebutuhan akan *self esteem* yang tinggi adalah hal yang mendorong terjadinya keseluruhan proses identitas sosial dan kategori sosial. Penelusuran terhadap tokoh-tokoh Sekber Keistimewaan Yogyakarta ditemukan bahwa penilaian identitas sosial adalah tinggi. Hal ini disebabkan oleh komparasi dengan kategori sosial yang diwakili oleh pemerintah pusat.

Kompetisi sosial adalah strategi yang tergantung pada keyakinan orang tentang hubungan antar kelompok yang alami. Secara umum ide tersebut menjadi teori identitas

sosial dan terakhir teori identitas sosial dari perilaku antar kelompok (Hogg, dkk, 2004). kelompok berkompetisi dengan kelompok lain untuk menjadi berbeda dan lebih baik, serta mengapa mereka berjuang mencapai status yang tinggi, prestise dan keberbedaan.

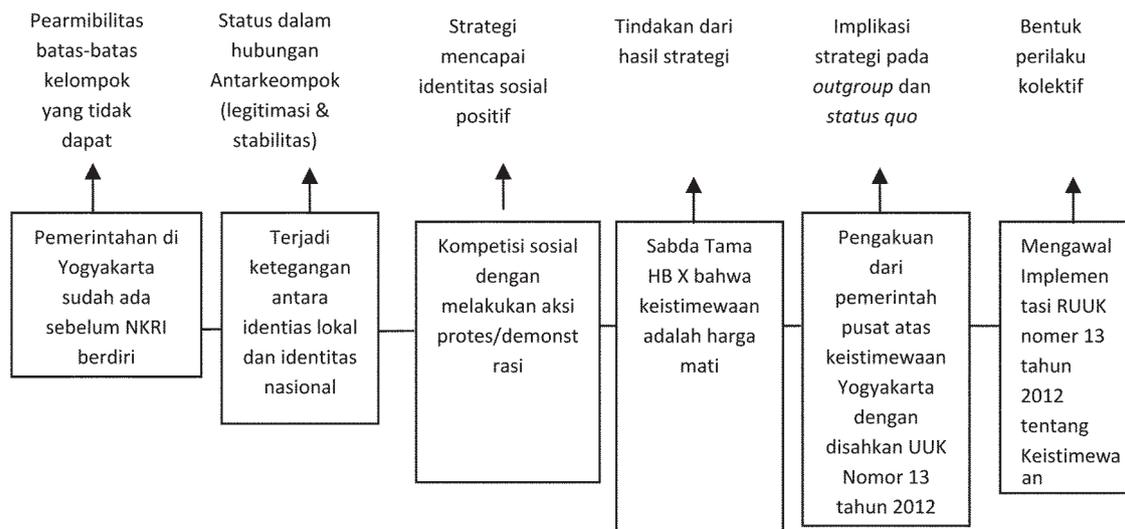
Melihat berbagai ketimpangan di sektor nasional tersebut telah membuka ruang kompetisi sosial antara kelompok pro penetapan yang mewakili identitas lokal dengan pemerintah pusat yang menginginkan alam demokrasi hidup di bumi Mataram. Strategi kompetisi sosial dipilih oleh kelompok pro penetapan untuk mempertahankan status keistimewaan Yogyakarta.

Kepuasan dan meningkatnya status identitas sosial warga Yogyakarta atas keistimewaan yang berhasil diraih pada tahun 2012 dianggap sebagai hal yang wajar, karena perjuangan

untuk mencapai identitas sosial positif itu telah dilakukan sejak tahun 1998 hingga 2012. Saat ini yang perlu untuk dilakukan adalah bagaimana mengimplementasikan UUK nomer 13 tahun 2012 untuk mewujudkan kesejahteraan DIY. Kelompok pro penetapan yang diwakili oleh Sekber keistimewaan akan terus mengawal implementasi UUK tersebut

sehingga identitas sosial positif atas keistimewaan tetap terjaga dan bisa memberi manfaat yang besar bagi warga Yogyakarta maupun Indonesia.

Di bawah ini digambarkan upaya pencapaian identitas sosial positif atas keistimewaan Yogyakarta.



KESIMPULAN

Pemaknaan identitas sosial atas keistimewaan Yogyakarta diterjemahkan dalam lima hal yaitu istimewa dalam pengisian jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur melalui mekanisme penetapan, istimewa dalam kebudayaan, istimewa dalam kelembagaan, istimewa dalam Tata ruang dan istimewa dalam pengelolaan pertanian.

Upaya memperjuangkan identitas sosial positif melalui dua cara yaitu: *pertama*, level individual dengan cara menciptakan optimalisasi keunikan untuk meningkatkan status kesadaran terhadap identitas sosial yang mengalami krisis akibat tekanan dari pemerintah pusat dan alam demokrasi. Dalam tahap ini individu mengevaluasi kesesuaian antara identitas personal dan identitas sosial sebagai bagian dari kelompok. Warga Yogyakarta merasa bahwa keistimewaan tidak hanya melekat pada tatanan pemerintahan tetapi juga secara individual mereka menganggap

dirinya istimewa dengan kepemilikan atas budaya, adat istiadat serta persepsional lainnya terhadap lingkungan hidup mereka. Optimalisasi keunikan ini merupakan tahap yang penting bagi individu untuk bergabung dalam kelompok dengan aktif dan partisipatif. Ini merupakan tahap terjadinya depersonalisasi sebagai syarat munculnya kolektivisme dalam mencapai tujuan bersama

Kedua, pada level kelompok upaya memperjuangkan identitas sosial positif dilakukan dengan strategi kompetisi sosial. Kelompok pro penetapan (*in group*) melakukan berbagai aksi atau gerakan sosial yang berupa protes, demonstrasi serta menggunakan bahasa simbolik yang semuanya mengartikulasikan adanya pertentangan, dan perlawanan terhadap pemerintah pusat yang dalam hal ini dipahami sebagai *outgroup*. Kompetisi sosial dipilih karena adanya penilaian dari *ingroup* atas statusnya yang lebih tinggi dari *outgroup*. *Outgroup* merasa memiliki legitimasi yang kuat terhadap

status keistimewaan dengan dibuktikan oleh fakta sejarah dari terbentuknya negara-bangsa Indonesia.

SARAN

Peneliti yang tertarik pada kajian lokalitas masyarakat Yogyakarta, disarankan menggalang lebih lanjut persoalan hubungan antara identitas lokal dan identitas nasional pasca disahkannya UUK. Mengingat bahwa hubungan antar identitas sosial tidak berada pada garis yang seimbang, tetapi selalu diwarnai oleh dinamika yang bersifat heterogen.

DAFTAR PUSTAKA

- Abrams, D., Hogg, M. A. (1990). "Social Identification. Self Categorization and Social Influence". *European Review of Social Psychology*, Vol. 1, pp. 195-228.
- Ahmadi, Abu. (1999). *Psikologi Sosial*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. (1998) *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta. Rineke Cipta
- Azwar, Saifuddin. (2003). *Metode Penelitian*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Cameron, James E. (2004). "Three Factor Model of Social Identity", *Self and Identity*. Vol. 3, pp. 239-262. Taylor & Francis Group. Psychology Press.
- Creswell, John, W. (1998). *Qualitative Inquiry and Research Design : Choosing Among Five Traditions*. California. Sage Publications
- Haslam, Alexander, S. (2001). *Psychology in Organization (The Social Identity Approach)*. New Delhi. Sage Publication.
- Hogg, Michael A. & Abrams, D. (1990). "Social Motivation, Self Esteem and Social Identity". In D. Abrams & M. A. Hogg (Eds), *Social Identity Theory : Constructive and Critical Advance*, pp. 28-47. New York. Haverster Wheatsheaf
- Hogg, Michael. Abrams, Dominic. Otten, Sabine. Hinkle, Steve. (2004). "The Social Identity Perspective Intergroup Relations, Self-Conception, And Small Groups". *Small Group Research*, Vol. 35, No. 3, pp. 246-276. Sage Publication.
- Klandermans. (1997). *The Social Psychology of Protest*. Oxford. Blackwell.
- Kompas, Kamis 18 Maret 2012. Keistimewaan Yogyakarta: "Aspirasi Masyarakat Yogyakarta Sudah Jelas"
- Kompas, Rabu, 28 Maret 2012 tentang Konsolidasi Demokrasi Di Yogyakarta: "Demokrasi dalam Wacana Keistimewaan".
- Prawasti, Y. Cicilia. (2003). "Pertikaian Kelompok Etnik di Kalimantan Barat : Tinjauan Berdasarkan Teori Identitas Sosial". *Jurnal Psikologi Sosial*, 77. Fakultas Psikologi Universitas Indonesia.
- Moleong. Lexy J. (1998). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung. Remaja Rosda Karya
- Moustakas, Clark. (1994). *Phenomenological Research Methodes*. New Delhi. Sage Publication
- Turner, J. C. Giles, Howard. (Eds) (1981). *Intergroup Behavior*. Oxford. Blackwell
- Strauss Anslem, Corbin Juliet. (1990). *Basics of Qualitatif Research Grouded Theory Procedure and Technique*. New Delhi. Sage Publications.
- Whitley, B. E. Kite, M. E. (2006). *The Psychology of Prejudice and Discrimination*. Canada: